

MENGURAI RUPA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI DESA PAYA BENUA, NEGERI LASKAR PELANGI

Nurhayati^{1*}, Aji Fajar Suryo Antoro²

^{1,2} Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia

*Korespondensi : ajifajar@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif merupakan bentuk pelaksanaan sistem demokrasi dan diwajibkan secara undang-undang dalam tahapan perencanaan pembangunan desa. Pada penerapannya di lapangan masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk keterlibatan masyarakat Desa Payabenua dalam proses pengambilan keputusan administratif dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterlibatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Payabenua, Provinsi Bangka Belitung, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif termanifestasi melalui musyawarah mufakat, survei kebutuhan, dan partisipasi dalam kelompok kerja. Praktik-praktik ini mencerminkan penghargaan terhadap tradisi deliberatif, manajemen prioritas komunitas, dan kolaborasi aktif warga. Faktor-faktor seperti kesadaran politik, akses informasi, kapital sosial, dan stabilitas ekonomi ternyata memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keterlibatan masyarakat. Pemerintah perlu melaksanakan pertemuan dan penyuluhan langsung di desa secara rutin, membangun situs web resmi pemerintah desa, dan mengalokasikan dana untuk pembentukan komunitas lokal. Masyarakat disarankan aktif menghadiri pertemuan desa, memanfaatkan platform daring untuk akses informasi, dan berpartisipasi dalam pelatihan kapital sosial. Peneliti berikutnya disarankan melakukan penelitian lanjutan, termasuk studi komparatif dan evaluasi mekanisme partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.

Kata Kunci : Keterlibatan masyarakat, Pengambilan keputusan, Demokrasi lokal, Pembangunan desa, Kapital sosial

ABSTRACT

Community involvement in administrative decision-making is a form of implementation of the democratic system and is required by law at the village development planning stage. In its application in the field, there are still problems faced by the government and the community. This research aims to analyze the forms of community involvement in the administrative decision-making process of Payabenua Village and the factors that influence the level of involvement. The research method used is descriptive qualitative, using data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The results showed that in Payabenua Village, Bangka Belitung Province, community involvement in administrative decision-making is manifested through

consensus meetings, needs surveys, and participation in working groups. These practices reflect respect for deliberative traditions, community priority management and active citizen collaboration. Factors such as political awareness, access to information, social capital and economic stability were found to have a significant influence on the level of community engagement. The government should conduct regular in-person meetings and counseling in villages, build official village government websites, and allocate funds for the establishment of local communities. Communities should actively attend village meetings, utilize online platforms to access information, and participate in social capital training. Future researchers should conduct further research, including comparative studies and continuous evaluation of community participation mechanisms.

Keywords : *Community involvement, Decision-making, Local democracy, Village development, Social capital.*

A. PENDAHULUAN

Dalam era demokratisasi yang tengah berkembang di berbagai belahan dunia, prinsip keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi salah satu aspek fundamental yang menjamin kelangsungan demokrasi tersebut. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat legitimasi keputusan yang diambil. Desa, sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat, memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip keterlibatan ini (Sutrisman, 2019).

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 telah menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk dalam pengambilan keputusan administratif. Pasal 58 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang menghadapi tantangan dalam menerapkan prinsip ini secara efektif (Irawan, 2017). Dalam konteks Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, terdapat penekanan khusus pada perlunya keterlibatan masyarakat

dalam setiap aspek pemerintahan desa, termasuk pengambilan keputusan administratif. Namun, peraturan hukum ini belum tentu menjamin implementasi yang efektif di lapangan. Dalam kenyataannya, ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam menerapkan prinsip partisipasi masyarakat (Widodo, 2017).

Beberapa tantangan lain yang sering dihadapi dalam proses pengambilan keputusan administratif di tingkat desa antara lain kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya dalam proses pengambilan keputusan, kurangnya mekanisme yang transparan dan akuntabel, serta adanya potensi konflik kepentingan antar kelompok masyarakat (Saragih & Agung, 2017). Penelitian Rahmah & Hamdi (2021) menunjukkan bahwa tingkat literasi partisipasi masyarakat memiliki korelasi langsung dengan tingkat keterlibatan mereka dalam proses keputusan di desa. Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengambilan keputusan juga menjadi permasalahan serius. Temuan dari penelitian terbaru oleh Fatimah & Faddila (2023) menyoroti bahwa tingkat transparansi yang rendah dalam kebijakan desa dapat mengurangi kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor lain yang menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan administratif di tingkat desa adalah kurangnya sumber daya, kapasitas, dan keterampilan pihak desa dalam mengelola partisipasi masyarakat. Penelitian Masri, et al (2023) menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas pihak desa dalam mengelola partisipasi masyarakat adalah langkah penting dalam memastikan kelancaran dan keberlanjutan dari proses pengambilan keputusan yang inklusif. Dalam konteks inilah peran dari pemerintah daerah di tingkat kabupaten dalam memberikan bimbingan teknis dan sumber daya sangat penting untuk memastikan terciptanya mekanisme partisipasi yang efektif dan berkelanjutan di tingkat desa.

Permasalahan yang sama juga terjadi pada masyarakat Desa Paya Benua, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Negeri Laskar Pelangi. Desa Paya Benua juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa proses pengambilan keputusan administratif melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Mengingat bahwa kebijakan yang diambil pada tingkat desa sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, maka sangat penting bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diperhitungkan.

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Paya Benua Provinsi Bangka Belitung, dikenal dengan negeri laskar Pelangi, memiliki relevansi signifikan, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan desa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah desa dan stakeholder terkait dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Alasan peneliti memilih desa ini dikarenakan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas berbagai inisiatif pembangunan. Jika masyarakat terlibat secara aktif, ini dapat meningkatkan peluang keberhasilan program dan proyek yang dilaksanakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami pengalaman dan persepsi masyarakat Desa Paya Benua mengenai keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan administratif (Creswell, 2014). Subjek penelitian adalah warga Desa Payabenua, Provinsi Bangka Belitung, yang telah terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan administratif, termasuk tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan aparatur desa. Teknik pengumpulan data digunakan menggunakan metode: (1) wawancara mendalam dengan narasumber, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan reduksi data, paparan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat Desa Paya Benua dalam pengambilan keputusan administratif berbentuk partisipatif,

meskipun terdapat variasi signifikan dalam tingkat dan intensitas keterlibatan tersebut. Berdasarkan data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, keterlibatan masyarakat umumnya terjadi dalam bentuk musyawarah desa untuk pengambilan keputusan strategis seperti penggunaan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan sosial-budaya.

Pada dasarnya, keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan administratif di tingkat desa merupakan salah satu prinsip dasar dari penerapan sistem demokrasi yang baik. Studi oleh Samaun et al. (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa dapat meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Selain itu, penelitian oleh Rachmad et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan, sehingga mendorong keberlanjutan pembangunan. Pada tingkat desa, hal ini sangat relevan mengingat desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat (Natalia & Maulidya, 2023).

Namun, di sisi lain, terdapat juga temuan Sulitiani (2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Achir & Muhtar (2023), yang juga menunjukkan adanya hambatan serupa dalam menggalang partisipasi aktif

masyarakat dalam proses demokratisasi desa.

1. Bentuk Keterlibatan Masyarakat Desa Payabenua dalam Proses Pengambilan Keputusan Administratif

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif merupakan elemen penting dalam penguatan demokrasi lokal dan pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian yang dilaksanakan di Desa Paya Benua menunjukkan bahwa praktik keterlibatan masyarakat berlangsung dalam corak yang partisipatif, sesuai dengan konsep demokrasi partisipatif yang mengedepankan keterlibatan aktif warga dalam proses pembuatan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam prakteknya, keterlibatan masyarakat ini termanifestasi melalui beberapa cara, termasuk: a. Musyawarah Mufakat. Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui pertemuan yang terbuka bagi seluruh warga desa untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. b. Survei Kebutuhan. Administrasi desa melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat. c. Keterlibatan dalam Kelompok Kerja. Pembentukan kelompok kerja khusus yang melibatkan warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

Pertama, musyawarah mufakat yang terjadi di desa tersebut mencerminkan tradisi deliberatif yang memiliki akar kuat dalam budaya politik Indonesia, sejalan dengan konsep-konsep deliberative democracy yang dikemukakan oleh Habermas, di mana dialog dan diskusi antar warga desa tidak hanya berfungsi sebagai sarana ekspresi opini tetapi juga sebagai

mekanisme pengambilan keputusan kolektif (Muzzaqi, 2019).

Musyawarah mufakat merupakan salah satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, termasuk di Desa Paya Benua, Bangka Belitung. Sebagai contoh, ketika desa tersebut ingin membangun sebuah pusat kegiatan komunitas, prosesnya diawali dengan musyawarah mufakat. Seluruh anggota masyarakat, dari berbagai latar belakang, diundang untuk duduk bersama dalam sebuah forum terbuka. Mereka mendiskusikan dan merencanakan proyek tersebut bersama-sama. Setiap warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan keputusan akhir dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, bukan melalui pemungutan suara atau keputusan otoritatif dari kepala desa. Hal ini mencerminkan tradisi deliberatif yang ditekankan oleh Habermas, di mana dialog menjadi kunci dalam pembuatan keputusan yang demokratis.

Kedua, Pelaksanaan survei kebutuhan oleh administrasi desa menggambarkan upaya pemerintah desa untuk menangkap kebutuhan dan prioritas warga, yang mengindikasikan praktik good governance sebagaimana diuraikan oleh Grindle. Survei tersebut berperan sebagai alat pengumpulan informasi yang membantu dalam perumusan kebijakan dan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Muksin, 2022). Misalnya, administrasi desa melakukan survei untuk menentukan proyek infrastruktur mana yang harus didahulukan. Mereka dapat menyebarkan kuesioner atau mengadakan pertemuan untuk menanyakan pendapat warga terkait pembangunan jalan, sanitasi, atau fasilitas pendidikan. Hasil survei ini kemudian digunakan untuk membuat

kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga, memastikan bahwa dana desa digunakan dengan cara yang paling bermanfaat bagi komunitas.

Ketiga, Keterlibatan warga dalam kelompok kerja menunjukkan aplikasi praktis dari teori kolaboratif, di mana warga tidak hanya sebagai penerima pasif dari keputusan administratif tetapi sebagai mitra aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Hal ini mendukung ide bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan harus melampaui konsultasi menjadi kolaborasi yang substansial (Islamy, 2018).

Keterlibatan warga dalam kelompok kerja dapat diilustrasikan melalui proses pembentukan tim yang bertanggung jawab atas berbagai aspek kehidupan desa. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan lingkungan, kelompok kerja terdiri dari warga yang berminat dan berpengetahuan tentang pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sampah. Kelompok ini bekerja sama dengan pemerintah desa untuk merencanakan dan melaksanakan program seperti pembuatan kompos komunal atau penanaman kembali hutan bambu di sekitar desa. Anggota kelompok kerja ini bukan hanya penerima keputusan dari atas tetapi juga berperan aktif dalam menciptakan dan mengimplementasikan solusi yang mereka anggap penting untuk keberlanjutan lingkungan mereka (putra, 2019).

Pendekatan partisipatif ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas keputusan dan proyek yang dijalankan. Ini tidak hanya membantu dalam mencapai hasil yang lebih baik tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memajukan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Paya Benua. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya variasi signifikan

dalam tingkat dan intensitas keterlibatan, yang mengindikasikan bahwa meskipun kerangka kerja partisipatif telah ditempatkan, praktik nyata partisipasi masyarakat mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses terhadap informasi, tingkat pendidikan, dan sumber daya ekonomi. Penemuan ini senada dengan temuan Asgar (2023) yang menekankan bahwa partisipasi seringkali tidak merata dan bisa dipengaruhi oleh struktur kekuasaan lokal.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah desa untuk tidak hanya menyediakan mekanisme partisipasi tetapi juga memastikan kesetaraan akses bagi seluruh warga desa, yang sesuai dengan prinsip-prinsip empowerment dan inklusivitas dalam community development (Iskandar, 2020). Secara keseluruhan, penelitian di Desa Paya Benua memberikan wawasan berharga tentang praktik partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif di tingkat desa, sekaligus menyoroti kebutuhan untuk menangani ketidaksetaraan dalam keterlibatan partisipatif untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi yang sejati dan pembangunan yang inklusif.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keterlibatan Masyarakat Desa Payabenua

Penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan di Desa Paya Benua telah menghasilkan beberapa temuan penting terkait dengan dinamika partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif. Temuan ini menyoroti empat faktor kunci yang mempengaruhi tingkat keterlibatan masyarakat: kesadaran politik, akses informasi, kapital sosial, dan ekonomi desa.

Pembahasan berikut ini akan menguraikan temuan tersebut dengan berlandaskan pada teori-teori relevan dalam literatur ilmu sosial dan pemerintahan.

Pertama, Kesadaran Politik. Teori partisipasi politik yang dikembangkan oleh Verba dan Nie menyatakan bahwa tingkat kesadaran politik individu memiliki dampak langsung terhadap partisipasinya dalam kegiatan politik (Suryani & Azmy, 2020). Dalam konteks Desa Paya Benua, ini berarti bahwa pemahaman warga tentang hak dan kewajiban mereka sebagai anggota komunitas berpengaruh signifikan terhadap keterlibatan mereka dalam musyawarah desa. Penyuluhan politik dan pendidikan kewarganegaraan bisa menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran ini.

Mengacu pada kerangka teoretis yang dikembangkan oleh Verba dan Nie dalam karyanya tahun 1972, yang berjudul "*Participation in America: Political Democracy and Social Equality*," pemahaman yang mendalam mengenai konsep kesadaran politik menempati posisi krusial dalam menentukan sejauh mana individu terlibat dalam aktivitas politik (Verba & Nie, 1972). Implikasi dari teori ini terhadap dinamika di Desa Payabenua adalah bahwa kesadaran politik warga, yang mencakup pengenalan atas hak dan kewajiban mereka sebagai partisipan aktif dalam komunitas, berperan vital dalam menumbuhkan dan menguatkan partisipasi mereka dalam proses musyawarah desa. Penyuluhan politik yang sistematis dan program pendidikan kewarganegaraan yang dirancang untuk memperkuat kesadaran politik dan sosial bisa menjadi metode yang strategis dan efektif.

Program-program ini akan membekali warga dengan pengetahuan

yang mereka perlukan untuk berpartisipasi secara berdaya dan berkeadilan dalam forum-forum yang menentukan jalannya pemerintahan desa. Dengan demikian, inisiatif pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat struktur demokrasi dari bawah dengan memastikan bahwa warga desa dapat berkontribusi secara aktif dan informasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Kedua, Akses Informasi. Model kebijakan publik yang transparan, seperti yang dikemukakan oleh Heald, menekankan pentingnya akses informasi dalam pemerintahan yang baik. Di Desa Paya Benua, keterbukaan dan kejelasan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa ditemukan sebagai faktor yang memacu partisipasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif untuk memperbaiki mekanisme penyampaian informasi akan membantu meningkatkan kualitas keterlibatan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Chairunnisa, et al (2023), menunjukkan bahwa ketika informasi tentang kegiatan pemerintahan dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh warga, mereka lebih cenderung untuk terlibat dan memberikan kontribusi yang berarti. Hal ini sesuai dengan temuan pada konteks Desa Paya Benua, di mana penyediaan informasi yang jelas dan terstruktur telah memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan pengambilan keputusan strategis lainnya.

Dengan demikian, untuk melanjutkan dan memperdalam partisipasi masyarakat, pemerintah desa Paya Benua

perlu mengimplementasikan strategi yang lebih inovatif dan inklusif dalam menyebarkan informasi. Hal ini dapat mencakup penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan diseminasi data dan peningkatan kapasitas administratif untuk mengelola pertukaran informasi antara pemerintah desa dan warganya. Upaya semacam ini akan mendukung realisasi pemerintahan yang tidak hanya transparan tetapi juga responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan standar pemerintahan yang baik yang dianjurkan dalam literatur akademik dan praktik pemerintahan kontemporer.

Ketiga, Kapital Sosial. Kapital sosial, seperti yang diartikulasikan oleh Putnam dalam karyanya "*Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*", merupakan suatu konsep yang mengacu pada kualitas dan kuantitas hubungan sosial, norma-norma kepercayaan, serta institusi-institusi yang menggabungkan individu dan kelompok, memfasilitasi kerjasama dan koordinasi demi kesejahteraan kolektif (Samsuri, 2010). Dalam analisis kontemporer desa Paya Benua, kapital sosial termanifestasi dalam bentuk solidaritas sosial dan kolaborasi komunal yang signifikan, dimana kelompok kerja dan organisasi masyarakat berperan sebagai katalis dalam memfasilitasi partisipasi warga dalam pembuatan keputusan di tingkat lokal.

Studi terkini oleh Setiawan, et al (2020) menyatakan bahwa peningkatan kapital sosial berkorelasi positif dengan efektivitas tata kelola pemerintahan desa dan pemecahan masalah kolektif. Hasil ini terlihat jelas di Desa Paya Benua, di mana struktur sosial yang koheren dan interaksi yang berorientasi pada komunitas telah membentuk sebuah lingkungan yang

kondusif untuk dialog demokratis dan pengambilan keputusan yang inklusif.

Dalam konteks ini, strategi pemeliharaan dan pengembangan kapital sosial yang berkelanjutan menjadi imperatif. Intervensi seperti program pengembangan kapasitas untuk organisasi kemasyarakatan, workshop peningkatan keterampilan sosial, dan forum-forum komunitas dapat memperkuat jaringan sosial ini. Meningkatkan keterlibatan warga dalam berbagai aspek kehidupan desa tidak hanya mengoptimalkan kapital sosial yang ada tetapi juga menciptakan momentum untuk pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Keterkaitan antara kapital sosial yang kuat dan kualitas hidup yang tinggi, yang diamati dalam penelitian di Desa Paya Benua, meresonansi dengan temuan penelitian terkini yang mendukung konsep bahwa kapital sosial adalah aset yang tidak tergantikan dalam pengembangan dan kemajuan komunitas lokal.

Keempat, Ekonomi Desa. Hubungan antara stabilitas ekonomi dan partisipasi masyarakat mendukung teori yang dikemukakan oleh Mansbridge, yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang stabil memberikan kondisi yang menguntungkan untuk keterlibatan demokratis (Baihaqie, 2021). Di Desa Paya Benua, ditemukan bahwa situasi ekonomi yang lebih baik memberikan ruang bagi warga untuk terlibat lebih dalam kegiatan-kegiatan desa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan ekonomi desa dapat secara langsung berkontribusi pada peningkatan partisipasi masyarakat.

Dalam kerangka teoritis yang dianut oleh Mansbridge, terdapat asumsi fundamental bahwa terciptanya kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan warga

masyarakat untuk lebih banyak mengalokasikan waktu dan sumber daya mereka kepada partisipasi dalam urusan komunal dan demokratis. Hal ini bersumber dari premis bahwa kestabilan ekonomi dapat mengurangi ketergantungan individu pada pekerjaan subsisten sehari-hari, sehingga membuka peluang untuk keterlibatan dalam aktivitas sosial-politik.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang baik berhubungan positif dengan intensitas dan kualitas partisipasi warga dalam tata kelola local (Andhika, 2017). Penelitian yang dilakukan di Desa Paya Benua mengkonfirmasi hal ini, dimana situasi ekonomi yang membaik telah diidentifikasi sebagai katalisator yang mendorong warga untuk berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat struktur demokrasi di tingkat desa. Keadaan ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zitri, et. all (2022), yang menemukan bahwa peningkatan ekonomi di tingkat lokal berkontribusi pada pengembangan kapasitas warga untuk terlibat dalam proses-proses pembangunan yang partisipatif.

Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan ekonomi desa, seperti penguatan usaha mikro, peningkatan akses terhadap pasar, serta pemberian pelatihan keterampilan, menjadi langkah strategis yang dapat diambil. Melalui pendekatan ini, pemerintah desa Paya Benua berpotensi untuk menciptakan sebuah lingkaran virtuous di mana pertumbuhan ekonomi dan partisipasi demokratis saling memperkuat.

Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat tidak hanya menjadi indikator dari pemerintahan desa yang sehat tetapi juga sejalan dengan temuan dari penelitian Rostow yang mengaitkan tahapan pertumbuhan ekonomi dengan kapasitas

serta kualitas partisipasi politikarganya (Nasdian, 2015). Sejalan dengan pandangan tersebut, pengembangan ekonomi desa Paya Benua, melalui diversifikasi ekonomi dan penguatan infrastruktur lokal, dapat menempatkan desa pada lintasan yang menggabungkan kemajuan material dengan kemajuan sosial dan politik, memperkuat fondasi untuk sebuah masyarakat yang aktif, bertanggung jawab, dan demokratis.

D. KESIMPULAN

Penelitian di Desa Paya Benua, Provinsi Bangka Belitung ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan administratif desa terwujud dalam bentuk musyawarah mufakat, survei kebutuhan, dan keterlibatan dalam kelompok kerja. Musyawarah mufakat mencerminkan tradisi deliberatif yang menekankan dialog dan keputusan kolektif, sementara survei kebutuhan menandakan praktik tata kelola yang baik dalam memahami prioritas warga. Partisipasi dalam kelompok kerja mencerminkan teori kolaboratif dengan warga sebagai mitra aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat mencakup kesadaran politik, akses informasi, kapital sosial, dan kondisi ekonomi. Kesadaran politik memengaruhi sejauh mana warga terlibat dalam musyawarah, akses informasi yang memadai memacu partisipasi, kapital sosial mempromosikan solidaritas dan kolaborasi, dan kondisi ekonomi yang stabil memungkinkan warga untuk berpartisipasi tanpa beban finansial. Peningkatan dalam aspek-aspek ini dapat memperkuat demokrasi lokal dan membantu mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Achir, N., & Muhtar, M. H. (2023). Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna dalam Memaksimalkan Praktik Politik dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7581–7590.

<https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19099>

Andhika, L. R. (2017). Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(2). <https://doi.org/10.22212/jekp.v8i2.867>

Asgar, S. (2023). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu dan Pilkada Sebagai Dasar Legitimasi Kekuasaan Pemerintah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 5982–5994.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2802>

Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31–45.

<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Fatimah, E., & Faddila, S. P. (2023). Analisis Kinerja Perangkat Desa Dalam Melakukan Pelayanan Administrasi Pada Kantor Desa Pinayungan. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 947-953.
- Goodin, R. E. (2021). *Mendemokratisasi Proses Kebijakan: Handbook Kebijakan Publik* (N. Mangunsong, Penyunting; I. Bahiagie, Penerima; Tim Hikam, Layout/Desain Sampul). Jakarta: NUSAMEDIA. (Terjemahan dari Goodin, R. E. *The Oxford Handbook of Public Policy*. 2006, Oxford University Press).
- Irawan, Nata., *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Iskandar, A. H. (2020). *Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan SDGs Desa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Islamy H., L. O. S. (2018). *Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi*. Sleman: Deepublish.
- Masri, M. A., Ibrahim, M., & Hadi, M. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa Payakameng. *AJAD : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 26–30. <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i1.149>
- Mukisn, I. (2022). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah*. Safrinal (Ed.). Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka.
- Muzzaqi, F. (2019). *Diskursus Demokrasi Deliberatif Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nasdian, F. T. (2014). *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Natalia, Angga., & Erine Nur Maulidya, “Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Rachmad, A. F., Azaria, E., Xusan, Q. N., & Azzahra, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 75–88. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.773>
- Rahmah, M., & Hamdi, M. (2021). Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat di Desa Cileles, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio*, 1(2), 69-84. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1954>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>

- Samsuri. (2010). Transformasi Gagasan Masyarakat Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan Di Indonesia (Studi Pengembangan Kebijakan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah Era Reformasi). Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Saragih, Ramainim., & Sarwititi Agung, "Peran Komunikasi Politik Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Partisipatif Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa (Penggalian Bentuk Komunikasi Warga Masyarakat Terhadap Penggunaan Dana Desa)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Setiawan, A., et. all., (2020). *Diplomasi Ekonomi Indonesia di Asia Tengah*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Sulistiani, I. (2020). Komunikasi Pembangunan Partisipatif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Papua. *Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA)*, 2(2). <https://doi.org/10.25077/joseta.v2i2.230>
- Suryani, S., & Azmy, A. S. (2020). Partisipasi Politik Buruh Perempuan: Analisis Terhadap Keterlibatan Buruh Perempuan Dalam Serikat Pekerja Kimia, Energi Dan Pertambangan - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia / SP KEP- SPSI. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 15(1), 1940. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v15i1.3544>
- Sutrisman, Dudih., Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa, Bogor: Guepedia Publisher, 2019.
- Teddy Minahasa Putra, I. P. (2019). *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. Chicago: University of Chicago Press.
- Widodo, Isto., "Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Zitri, I., Rafidi, R., & Umami, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Karang Bongkot dalam Penyusunan PerDes Pembentukan BUMDes. *Journal of Character Education Society*, 5(3). Tersedia di: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jces>.